

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Gambaran suram mengenai penderitaan, kesedihan, kelaparan umat manusia akibat konflik telah lama berlangsung hingga saat ini. Tanpa suatu penyelesaian yang benar untuk menuju suatu perdamaian yang abadi yang telah menjadi cita cita atau tujuan bagi setiap umat manusia dan negara. Penderitaan yang tiada henti atas terjadinya konflik yang terjadi secara terus menerus yang akan menimbulkan keresahan bagi setiap umat manusia yang ada di muka bumi ini, konflik yang terjadi secara terus menerus di kawasan Asia Selatan khususnya konflik yang terjadi di Kasmir.

Konflik merupakan realitas yang kompleks dimana konflik melibatkan banyak faktor seperti individu ataupun kelompok yang terlibat dalam konflik, kepentingan dan berbagai model komunikasi dan hubungan. Konflik tidak bisa dihindari, tetapi harus dikelola.¹

Ketika membicarakan konflik, maka tidak bisa terlepas di dalam konteks Asia Selatan, seperti Konflik Kashmir, India dan Pakistan selalu menjadi salah satu contoh konflik yang hingga saat ini belum bisa terselesaikan di kawasan Asia Selatan.

¹M. Mukhsin Jamil, *Mediasi dan Resolusi Konflik* (Semarang: walisongo Mediation Center (WMC) & IAIN Walisongo, 2007), hal 8.

Konflik yang sangat menarik untuk diangkat, yang dimulai dari berbagai benturan kepentingan dan kekuasaan yang bermain di dalam kedua negara baik oleh Pakistan dan India. Hal ini merupakan contoh bagaimana Ilmu Hubungan Internasional diterapkan. Lewat fenomena-fenomena yang terjadi di kawasan Asia Selatan, kita bisa mengetahui bagaimana sebuah kepentingan nasional suatu bangsa dipertahankan lewat berbagai strategi yang mengikutinya.

Konflik Kashmir, India dan Pakistan selalu menjadi salah satu contoh konflik yang hingga saat ini belum bisa terselesaikan di kawasan Asia Selatan. Asia Selatan adalah suatu wilayah di benua Asia yang berada di sebelah selatan benua Asia, dan wilayah Asia Selatan ini merupakan wilayah bekas jajahan kolonial Inggris, yang di maksud dengan konteks wilayah asia selatan pada abad 20 yaitu meliputi negara India, Pakistan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Sebelum Pakistan merdeka pada tahun 1947 Pakistan merupakan sebuah bagian dari negara India, yang pada saat itu ketika India menjadi jajahan Inggris, dan kemudian adanya dua mayoritas agama di India yaitu Islam dan Hindu. Pada saat itu Mohammad Ali Jinnah menginginkan sebuah tanah air yang terpisah bagi penganut muslim India dan penganut Hindu India, dan pada akhirnya Inggris menyetujui pembagian wilayah tersebut yang menjadi dua negara yang merdeka yaitu Pakistan dan India, tetapi yang menjadi permasalahan besar adalah Inggris tidak melakukan pengawasan yang ketat terhadap pembagian pengambil alihan kekuasaan negara tersebut.

Akibatnya ada 3 princely state² yang belum bisa menentukan nasibnya sendiri yaitu Junagadh, Hyderabad dan Jammu Kashmir ketiga princely state tersebut belum bisa menentukan pilihan apa mau mengikuti Pakistan atau India, dikarenakan ketiga princely state tersebut tidak mempunyai kesamaan antara rakyat dan penguasanya.

Junagadh merupakan negara kecil yang 80% penduduknya beragama Hindu tetapi penguasanya beragama Islam dan lebih condong untuk memilih bergabung dengan Pakistan, sedangkan Hyderabad merupakan negara kecil yang mayoritas penduduknya beragama Hindu sedangkan penguasanya beragama Islam. Tetapi tidak mau memilih untuk bergabung dengan Pakistan atau India, sedangkan Jammu Kashmir yang hampir mayoritas penduduknya beragama Islam dan penguasanya beragama Hindu lebih cenderung memilih untuk bergabung dengan Pakistan. Tetapi pada akhirnya Junagadh, Hyderabad berhasil bergabung dengan India lewat jalan referendum dan pendudukan militer.

Pada waktu akhir kekuasaan Inggris, penguasa atau raja muda (viceroy) Inggris di India, Lord Louis Mountbatten, menyampaikan kepada Maharaja Kashmir untuk memilih ikut India atau Pakistan. Kashmir tidak diberi celah untuk menjadi negara merdeka. Ia juga menyatakan bahwa untuk wilayah perbatasan

² (Princely state adalah Sebuah negara pangeran (juga disebut negara asal (hukum) atau negara bagian India) adalah nominal berdaulat entitas India selama British Raj yang tidak secara langsung diatur oleh Inggris, melainkan oleh penguasa lokal di bawah bentuk pemerintahan tidak langsung dikenakan aliansi anak dan kedaulatan atau paramountcy dari British Crown . Ada resmi 565 negara pangeran di India pada saat kemerdekaan tahun 1947, namun sebagian besar telah tertular dengan Viceroy of India untuk memberikan pelayanan publik dan pengumpulan pajak. Hanya 21 yang utama memiliki pemerintah negara bagian yang sebenarnya, dan di antara mereka hanya empat yang besar (yaitu Hyderabad , Mysore , Baroda dan Jammu dan Kashmir) "Ramusack 2004 , p. 87 Quote: "The British system of indirect rule over Indian states ... provided a model for the efficient use of scarce monetary and personnel resources that could be adopted to imperial acquisitions in Malaya and Africa. (p. 87)"

yang penduduknya Muslim terbesar harus bergabung dengan Pakistan (Ganguly 2005). Seperti di Hyderabad dan Junagadh pertimbangan mayoritas penduduknya yang beragama Hindu mengakibatkan Pakistan tidak terlalu mempermasalahkan ketika bergabung dengan India. Disisi lain oleh India, Kashmir diharapkan bergabung dengan India untuk membuktikan bahwa mayoritas Muslim di sebuah negara bagian bukanlah sebuah ancaman dalam konteks India adalah negara yang sekular. Sementara di sisi lain, Maharaja Hari Singh berusaha agar kerajaannya dapat merdeka, dengan memperlambat keputusannya untuk memilih India atau Pakistan sampai terjadinya partisi. Maharaja akhirnya memilih bergabung dengan India dengan penyerahan kekuasaan, khususnya bidang pertahanan, luar negeri, dan komunikasi kepada pemerintah India. Penyerahan kekuasaan inilah yang menjadi dasar klaim India atas Kashmir³

Tetapi untuk rakyat Jammu Kashmir sendiri sampai sekarang belum bisa untuk memilih mau bergabung dengan Pakistan atau India, menurut rakyat Kashmir keputusan Maharaja Harry Singh itu hanya sebatas keputusan antara penguasa India dengan penguasa Kashmir. Tetapi belum ada referendum yang jelas yang mengatakan bahwa adanya persetujuan rakyat untuk mau bergabung dengan India, sehingga hal ini menyebabkan konflik yang berkepanjangan serta adanya keinginan antara negara Pakistan dan India untuk menjadikan Jammu Kashmir sebagai bagian dari negaranya.

Dengan penduduk Kashmir yang lebih memilih untuk bergabung dengan Pakistan, tetapi penguasa Kashmir yang beragama Hindu lebih memilih untuk

³ Kompas, 7 Januari 2002)

bergabung dengan India. Dan hal ini menimbulkan kemarahan atas penduduk Kashmir yang sangat kecewa terhadap sang penguasanya yang lebih memilih untuk bergabung dengan India. Oleh sebab itu terjadinya gelombang kemarahan serta perotes rakyat Kashmir terhadap sang penguasanya yang bernama Harry Singh.

Pakistan menerima para pengungsi Kashmir untuk tinggal di wilayah negaranya, konflik Kashmir yang berkepanjangan yang telah begitu banyak memakan korban jiwa, serta menghancurkan rumah-rumah Penduduk Kashmir serta tempat ibadah dan sekolah yang telah hancur akibat konflik ini.

Faktor utama yang sangat merasakan kerugian di dalam konflik ini adalah para penduduk Kashmir sendiri, oleh sebab itu jika konflik ini terjadi secara terus menerus dan tidak bisa di selesaikan maka akan bisa menimbulkan kerugian yang banyak yang dapat di rasakan secara langsung oleh penduduk Kashmir. Hal ini sangat membuat penulis merasa menarik untuk menganalisa, mengapa Pakistan mau menerima para pengungsi Kashmir dengan baik? dan semoga tulisan ini bisa memberikan dan menambah wawasan kita mengenai konflik di Kashmir.

B. Tujuan penulisan

Adapun tujuan dari penulisan adalah sebagai berikut :

1. Skripsi ini bertujuan untuk Mengembangkan dan mengamalkan keilmuan selama belajar di perguruan tinggi serta menambah wawasan intelektual sebagai mahasiswa setelah menerima ilmu-ilmu selama kuliah.

2. Penulis skripsi ini bertujuan untuk membahas dan menganalisa fenomena konflik yang khususnya fenomena konflik yang terjadi di asia selatan khususnya yang disebabkan oleh faktor –faktor perbatasan, agama, sumber daya alam Danlain-lain.
3. Untuk mengetahui apa saja kepentingan dan kebijakan Pakistan terhadap pengungsi Kashmir?
4. Di samping itu penulisan ini juga di buat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Pakistan adalah negara yang menjadi pecahan India setelah menuntut Inggris untuk juga dimerdekakan pada tanggal 14 Agustus tahun 1947. Pakistan beribu kota Islambad. Pakistan menjadi negara yang berbasis Islam dan Pada Tahun 1947 Inggris memutuskan untuk memerdekakan wilayah koloninya, yaitu Kekaisara India. Sambil membaginya menjadi 2 wilayah berbeda : Dominion Pakistan di barat yang didominasi Islam & Persatuan India di timur yang mayoritasnya Hindu. Dalam pembagian itu, wilayah Kashmir diberi kebebasan untuk memilih dalam tiga opsi yaitu ;

1. Kashmir bergabung dengan Pakistan
2. Kashmir bergabung dengan India
3. Kashmir membuat kedaulatan negaranya sendiri

Tetapi sepertinya, Kashmir tidak bisa untuk menentukan nasib bangsanya sendiri. Dan dalam pembagian itu Kashmir sendiri merupakan salah satu dari sekian banyak wilayah yang pada saat terjadinya dekolonisasi Inggris. memiliki kesempatan untuk memilih di antara dua negara yang memiliki latar belakang agama yang berbeda yaitu Pakistan dan India.

Namun selain Kashmir, pada saat itu ada juga tiga wilayah yang sulit untuk menentukan pilihan mengingat tiga princely state tersebut tidak memiliki keseragaman antara penguasa dan mayoritas warganya dalam hal agama yang dianutnya. Princely state tersebut yaitu, Junagadh, Hyderabad, dan Jammu. Kashmir Junagadh merupakan negara kecil dengan 80% penduduknya beragama Hindu, tetapi penguasanya adalah seorang Muslim yang cenderung pro terhadap Pakistan. Hyderabad berpenduduk mayoritas Hindu dengan penguasa seorang Muslim tetapi tidak memiliki hubungan baik dengan Pakistan maupun India.⁴

Sedangkan Jammu-Kashmir memiliki penduduk mayoritas Muslim sebanyak 90% dan condong kepada Pakistan, tetapi penguasanya yang beragama Hindu kemudian membawa Jammu-Kashmir ke dalam India dan hal ini menyebabkan konflik antara India dan Pakistan.

Dikarnakan Kashmir merupakan wilayah di kawasan Asia Selatan yang diperebutkan oleh beberapa negara seperti India dan Pakistan. Penduduk

⁴ Dhurorudin Mashad, Kashmir : Derita yang Tak Kunjung Usai, Khalifa, Jakarta, April 2004, hlm.

kashmir yang multi agama dan memiliki berbagai tujuan serta kepentingan yang berbeda beda,yang menyebabkan penduduk Kashmir terpecah menjadi beberapa kelompok.

Perebutan wilayah tersebut, mengakibatkan ketidakjelasan dari penduduk untuk menentukan nasibnya dalam menentukan kewarganegaraannya. Penyebab awalnya yaitu ketika India tetap mengklaim seluruh wilayah Kashmir adalah teritorialnya dan Pakistan menolaknya.

Kashmir sendiri merupakan simbol bagi identitas nasional India sekaligus Pakistan, sebenarnya nama Pakistan merupakan gabungan dari etnik muslim yang ingin melepaskan diri dari India,yang terdiri dari etnik Punjabi, Sindhi, Kashmiri, Afgan dan Baluchistan yang kemudian membentuk negara yang sekarang di kenal sebagai Pakistan.⁵

Dikarnakan India tetap mengklaim seluruh wilayah Kashmir adalah teritorialnya dan Pakistan menolaknya, hal ini menyebabkan sangat sulitnya terjadi kompromi di antara India dan Pakistan. Sehingga terjadinya peperangan besar yang pertama antara Pakistan dan India terjadi di wilayah Kashmir pada tahun 1947⁶. Perang pertama yang berlangsung antara India dan Pakistan ini membuat PBB ikut campur, tangan menengahi permasalahan yang berlangsung PBB sendiri kemudian mengeluarkan resolusi pada tahun 1948.

⁵Surwandono,ahmadi sidiq,resolusi konflik di dunia islam ,yogyakarta :graha ilmu 2011

⁶ Chari, P.R. et al. Four Crises and a Peace Process: American Engagement in South Asia. Washington D.C.: Brookings Institution Press. 2007

Resolusi ini mengamanatkan bahwa penyelesaian, masalah Kashmir akan diselesaikan melalui cara yang demokratis yaitu plebisit yang bebas bagi rakyat Kashmir untuk memilih apakah bergabung dengan India ataupun Pakistan.⁷ India sendiri menanggapi bahwa pendudukannya di Kashmir hanya untuk memulihkan keadaan dan bila keadaan sudah memungkinkan maka akan dilaksanakan referendum sebagaimana yang tertulis pada resolusi PBB. Namun ternyata hal itu tidak pernah terjadi. Bahkan tidak di patuhi oleh India, secara diam-diam India melancarkan langkah-langkah politik yang mengarah pada penguasaan wilayah Kashmir atas India.

Majelis konstituante Jammu-Kashmir yang merupakan pemerintahan boneka buatan India misalnya, Pada tanggal 6 Februari 1954 meratifikasi pengintegrasian wilayah Kashmir kepada India. Pada 26 Januari 1957 India lantas merumuskan ketentuan pemindahan kekuasaan ini dan menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak dapat diganggu gugat apalagi untuk dibatalkan.

Setelah Pakistan dan India melakukan peperangan pertama pada tahun 1947 dan gagalnya proses perdamaian/referendum yang dilakukan oleh PBB akibat ketidak patuhannya India terhadap hasil keputusan PBB, sehingga memutuskan India untuk membuat hasil referendum sendiri untuk Kashmir. Sebenarnya sempat ada kesepakatan di antara kedua pemimpin negara yang kemudian menyepakati resolusi mengenai batas wilayah Kashmir pada Juni 1949 yang nantinya berkembang menjadi garis Line of Control (LoC) pada

⁷ Pribadi, Jubaidi, Kashmir dan Timor Timur (Peran PBB), Yayasan Pustaka Grafiksi, Jawa Barat, 1999

Agustus 1972 (Lyon 2008,184&193). Pada dasarnya garis batas tersebut membagi dua wilayah Kashmir yakni Pakistan Over Kashmir (PoK) dan India Over Kashmir (IoK) (Bose 2007,155). Seringkali ketegangan antara militer Pakistan dan India terjadi di sepanjang garis Line of Control (Krisberg 1999,140).

Dan terjadinya Pelanggaran nilai demokrasi, terhadap rakyat Kashmir yang berada di wilayah India over Kashmir hal ini memberi kesempatan bagi Pakistan untuk kembali terlibat. Dengan melihat latar belakang munculnya ketegangan konflik yang di sebabkan oleh pelanggaran nilai demokrasi, maka Pakistan dapat terlibat melalui dukungan langsung terhadap pembelaan nilai-nilai demokrasi.

Pakistan juga membolehkan rakyat Kashmir yang berada di wilayah India over Kashmir untuk mengungsi ke Pakistan. Dengan di legalkannya rakyat Kashmir mengungsi di Pakistan, Hal ini menyebabkan lahirnya para pengungsi yang kebingungan dalam ketidak jelasan mengenai kewarganegaraannya.

Dan banyak rakyat Kashmir yang melarikan diri dari negaranya dan menjadi pengungsi, sejumlah besar pengungsi Kashmir tinggal di kampung pengungsian di Azad Jammu Kashmir dan banyak di antara mereka tinggal di Pakistan dan di negara Eropa. Negara Pakistan dengan tangan terbuka mau menerima para pengungsi Kashmir yang notabennya 90% beragama Islam. Dengan Pakistan memberikan suaka (Asylum) terhadap pengungsi Kashmir, suaka Asylum yaitu perlindungan yang diberikan oleh suatu negara

kepada warga negara dari negara lain. Konsepsi suaka (Asylum) dalam hukum internasional meliputi dua unsur, yaitu:

1. Tempat untuk mengungsi dan memberikan perlindungan penuh terhadap para korban (pengungsi).
2. Dan Memberikan tempat perlindungan aktif di pihak penguasa⁸

Hal ini di jadikan langkah strategis bagi Pakistan, dalam proses perebutan dominasi di Kashmir dengan negara india. Di sini posisi Pakistan sepertinya ingin menjadi The Mother Land bagi kaum muslimin yang tersingkir dari kashmir, akibat tindakan politik golongan Hindu. Oleh karena itu, Pakistan menginginkan Kashmir menjadi negeri yang kuat dalam bidang politik, ekonomi dan militer.

Jika Pakistan mampu menguasai India over Kashmir yang sebagian besar wilayahnya yang terdiri dari, sumber daya air, sumber daya hutan serta populasi muslim, dan diantara enam aliran sungai yang melewati wilayah Pakistan, lima sumber air berada di wilayah India over Kashmir. Maka tidak heran, jika India maupun Pakistan sangat berminat untuk mengeskplotasi sumber daya air di wilayah Kashmir. Akibatnya sering muncul konflik diantara kedua negara tersebut yang terkait isu sumber daya air. Keinginan Pakistan untuk mendapatkan potensi-potensi tersebut diperkuat dengan kondisi domestik Pakistan sejak akhir tahun 1980an. Pakistan mencatat peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup tinggi, peningkatan ini sudah dirasakan sejak masa perang dingin hingga setelah berakhirnya perang dingin.

⁸Widagdo Setyo, Suaka Diplomatik Dalam Perspektif Hukum Internasional, Jurnal Arena Hukum Nomor 6 :1998).

Pertumbuhan ini terbilang cukup tinggi, diantara negara-negara di dunia. Kondisi ini kemudian memberikan gambaran tentang ledakan penduduk bahkan sejak tahun 1980an. Kondisi ini terus berlangsung hingga tahun 2001 dan jumlah penduduk Pakistan hingga tahun 2013 sebanyak 193.239.000 jiwa. Dengan angka pertumbuhan penduduk sebesar 1,5 %. Angka kelahiran per 1000 penduduk (CBR) sebesar 24 jiwa per 1000 penduduk.

Wilayah sengketa *India over Kashmir* merupakan wilayah yang strategis bagi Pakistan, aliran air yang bersumber di wilayah *India over Kashmir* merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan masyarakat Kashmir. Pakistan membutuhkan debit air untuk mengimbangi krisis ledakan penduduk, semakin besar jumlah penduduk maka semakin banyak debit air yang dibutuhkan Pakistan. Disamping itu debit air juga dibutuhkan untuk sistem irigasi, sementara kemampuan Pakistan dalam mengontrol debit air terbatas oleh penguasaan India terhadap wilayah sumber air Kashmir.

Maka tidak heran jika Pakistan melakukan kepentingan nasionalnya dengan cara mau menerima para pengungsi Kashmir tersebut, dengan kata lain agar Pakistan bisa mendapatkan dan melakukan politik demografi di wilayah Kashmir. Oleh sebab itu pengungsi Kashmir sebagai salah satu jalan bagi Pakistan untuk mendapatkan peluang yang lebih besar, agar adanya keinginan dari para pengungsi tersebut untuk mau bergabung dengan Pakistan.

D. Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis menarik suatu rumusan masalah yaitu :

“ Mengapa Pakistan memberikan perlakuan yang baik terhadap pengungsi Kasmir?”

E. Kerangka Dasar Pemikiran :

Defenisi Konsep Kepentingan Nasional :

Dari konflik yang terjadi antara India dan Pakistan dalam memperebutkan wilayah kasmir, sebagai suatu wilayah yang sangat banyak memberikan keuntungan apabila pakistan bisa menjadikan kashmir sebagai bagian dari negaranya. Begitu pun sebaliknya dengan india dari konflik di antara ke dua negara tersebut maka bisa mengambil analisis bahwa adanya kepentingan nasional baik pakistan maupun india terhadap wilayah Kashmir.

Kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Maka oleh sebab itu tidak heran jika Pakistan melakukan kepentingan nasionalnya dengan cara mau menerima pengungsi Kashmir. Kepentingan nasional merupakan alasan ataupun dasar sebuah negara dalam menjalani komunikasi, interaksi, dan kebijakan di dunia internasional.

Sehingga setiap kebijakan maupun keputusan yang diambil suatu negara pasti akan berlandaskan dengan kepentingan nasional negaranya. Dan berikut ini adalah pengertian kepentingan nasional menurut Hans J. Morgenthau :

Hans J. Morgenthau, kepentingan nasional (national interest) merupakan pilar utama bagi teorinya tentang politik luar negeri dan politik internasional yang realis. Pemikiran Morgenthau didasarkan pada premis bahwa strategi diplomasi harus didasarkan pada kepentingan nasional, bukan pada alasan-alasan moral, legal dan ideologi yang dianggapnya utopis dan bahkan berbahaya.

Hans J. Morgenthau menyatakan kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerjasama.

Demikianlan Morgenthau membangun konsep abstrak yang artinya tidak mudah di definisikan, yaitu :

1. Kekuasaan (power).
2. Kepentingan (interest).

Yang dianggapnya sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan politik internasional. Menurut Morgenthau, "Kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain". Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik (Hans J.Morgenthau,1990)

Teori Referendum :

Banyak masyarakat awam yang tidak mengetahui dengan pasti, arti kata Referendum tersebut. Definisi referendum adalah, pelaksanaan pemungutan suara bagi suatu komunitas masyarakat di suatu daerah (dalam satu negara). Kata Referendum atau Plebisit berasal dari bahasa Latin yaitu plebiscita yang berarti pemilihan langsung, dimana pemilih diberi kesempatan untuk memilih atau menolak suatu tawaran/usulan.

Di Indonesia sering disebut jajak pendapat sedangkan di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) disebut Penentuan Nasib Sendiri (Self Determination). Referendum sama dengan melaksanakan pemilihan umum, bedanya bukan untuk memilih presiden atau wakil-wakil rakyat yang akan duduk di parlemen (DPR). Tetapi rakyat diberikan kebebasan untuk menentukan pilihannya. Apakah ingin merdeka (memisahkan diri) atau tetap berintegrasi dengan sebuah negara yang selama ini menjadi induknya.

Sebenrnya Kashmir diberi kebebasan untuk memilih dalam tiga opsi untuk menentukan nasib bangsnya yaitu ; Kasmir bergabung dengan pakistan, Kasmir bergabung dengan India atau Kasmir membuat kedaulatan negaranya sendiri. Tetapi sepertinya kasmir tidak bisa untuk menentukan nasib bangsnya sendiri sehingga terjadinya peperangan besar yang pertama antara Pakistan dan India terjadi di wilayah Kashmir pada tahun 1947.⁹

Teori Politik Demografi :

⁹ Chari, P.R. et al. Four Crises and a Peace Process: American Engagement in South Asia. Washington D.C.: Brookings Institution Press. 2007

Demografi adalah, ilmu yang mempelajari persoalan dan keadaan-keadaan perubahan penduduk atau dengan kata lain segala hal yang berhubungan dengan komponen-komponen perubah tersebut seperti kelahiran, kematian dan migrasi. Dalam pembahasan ini perubahan demografi politik dapat mempengaruhi fenomena pemerintahan dan politik.

Ketika demografi dimaknai dengan perspektif politik maka akan menghasilkan penjelasan terhadap realitas sosial mulai dari pertarungan kekuasaan hingga kekerasan.

Maka ketika kita menghubungkan antara demografi dan politik maka demografi politik menjadi patokan dari deretan angka statistik kependudukan yang akansangat menentukan konfigurasi serta kebijakan sosial politik suatu bangsa dan negara. Seorang Roger Geraudy, melakukan studi yang kaitannya dengan geografi politik Roger Geraudy berpendapat bahwa Dengan kepadatan penduduk yang tinggi di suatu negara maka negara tersebut harus memperluas wilayah dengan melakukan kebijakan pendudukan dan ekspansi. Maka mau tidak mau pemerintah harus membuka akses bagi warga negara untuk melakukan migrasi di sekitar wilayah negaranya agar bisa mendapatkan kemakmuran yang lebih baik.¹⁰

Ada faktor yang sangat menarik, dari sisi kepadatan penduduk di Pakistan negara Pakistan dengan mengalami perkembangan penduduk yang tinggi ternyata memiliki peluang yang besar untuk berkonflik. Salah satunya dengan melakukan

¹⁰ Geraudy, Roger, *Zionisme Keagamaan dan Politik*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 1993

kebijakan pendudukan dan ekspansi. Agar terciptanya kepentingan nasional Pakistan baik untuk rakyatnya dan negaranya.

Untuk bisa mendapatkan tingkat kemakmuran kehidupan yang lebih baik, maka mau tidak mau Pakistan harus berkonflik dengan India agar bisa mendapatkan wilayah Kashmir sebagai bagian dari negaranya, karena baik Pakistan dan India sama-sama mempunyai kepentingan terhadap wilayah Kashmir.

F. Hipotesa

1. Dengan diterimanya para pengungsi Kashmir merupakan langkah strategis Pakistan guna mendapatkan wilayah Kashmir. maka Pakistan merasa bahwa dengan cara referendum Pakistan bisa mempunyai peluang lebih besar untuk mendapatkan Kashmir.
2. Setiap negara pasti mempunyai kepentingan nasional, yaitu kepentingan yang harus di capai untuk negaranya dan kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, maka oleh sebab itu tidak heran jika Pakistan melakukan kepentingan nasionalnya dengan cara mau menerima pengungsi Kashmir.
3. Kondisi domestik Pakistan, sejak akhir tahun 1980an Pakistan telah mengalami peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup tinggi. Krisis kependudukan ini kemudian memunculkan kompleksitas, hal ini menandakan munculnya kebutuhan akan wilayah yang tidak hanya lebih luas tetapi juga strategis. Dengan peningkatan penduduk Pakistan yang tinggi maka Pakistan harus melakukan kebijakan kependudukan dan ekspansi wilayah salah satunya dengan cara politik demografi.

G. Metode Penelitian

Dalam mekanisme penulisan skripsi, metode yang digunakan adalah kualitatif. Pemberian bukti yang jelas beserta penjelasan yang mendalam mengenai hubungan-hubungan yang terkait mengenai bukti-bukti yang dipaparkan menjadi point penting mengenai mekanisme metode penelitian kualitatif.

Pengumpulan data dengan metode penelitian kualitatif atau studi literature berupa kajian yang bersifat deskriptif. Data data diperoleh melalui studi pustaka, menggunakan data sekunder yang di peroleh dari buku teks, teks, jurnal, ensiklopedia, artikel media massa ataupun elektronik seperti internet serta laporan maupun tulisan – tulisan yang relevan dengan tulisan yang di bahas.

Tujuan dari metodologi ini, untuk memberikan pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Metode penelitian kualitatif, yang di gunakan dalam studi kasus konflik di Kashmir antara India dan Pakistan memberikan data-data yang berupa penjelasan tentang hubungan antara variabel-variabel yang terdapat dalam kasus konflik di Kashmir.

H. Sistematika Penulisan :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab I terdiri dari pendahuluan Selanjutnya adalah rumusan masalah sebagai pembatas kajian agar fokus terhadap penelitian ini. Untuk mengupas masalah secara ilmiah maka peneliti menggunakan landasan teori terhadap bab ini.

Selanjutnya adalah metode penelitian sebagai langkah operasional penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II. DINAMIKA HUBUNGAN INDIA DAN PAKISTAN

Bab II menjelaskan tentang dinamika hubungan India dan Pakistan serta sejarah Negara Pakistan, India, dan Kashmir. Serta di dalam bab ini menjelaskan tentang kondisi khusus Kashmir yang menjadi rebutan antara Pakistan dan India pasca kemerdekaan, dan arti penting Kashmir bagi India dan Pakistan.

BAB III. DINAMIKA POLITIK PENGUNGGSI KASHMIR

Bab III menjelaskan tentang sejarah awal proses pengungsi Kashmir di Pakistan. Serta sejarah awal proses kelompok kepentingan di Kashmir.

BAB IV TUJUAN PAKISTAN TERHADAP PENGUNGGSI KASHMIR

Bab IV menjelaskan tentang Pengungsi Kashmir sebagai jembatan politik Pakistan dalam upaya penentuan status Kashmir. serta Mekanisme Pakistan untuk menarik simpati pejuang Kashmir

BAB V . KESIMPULAN

Bab V adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta adanya saran yang penulis berikan terhadap penulisan skripsi ini.